

DISKRIMINASI SOSIAL MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI JAGIR WONOKROMO

Nur Fu'ad

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
masfuad558@yahoo.co.id

Ali Imron

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
aimron8883@gmail.com

Abstrak

Perkotaan selalu menawarkan daya tarik, terutama bagi masyarakat desa yang ingin mengubah nasib dengan cara mencari pekerjaan. Bagi masyarakat desa, kota besar misalnya Kota Surabaya selalu memiliki daya tarik yang kuat ditandai tersedianya fasilitas-fasilitas misalnya lapangan pekerjaan, lembaga pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak ditemukan di desa. Hal ini tentu saja akan mendorong angka urbanisasi dari desa ke kota menjadi semakin tinggi. Penelitian ini mengambil lokasi pemukiman di sepanjang Sungai Jagir Wonokromo. Alasan memilih lokasi ini adalah karena adanya semacam konflik laten dalam masyarakat yang bermukim sepanjang Sungai Jagir tersebut. Konflik ini disebabkan adanya tindakan diskriminasi antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan disebelah timur. Praktik pendiskriminasian ini ditandai masyarakat di sebelah barat lebih mendapatkan perbedaan pengakuan dan perolehan hak-hak serta lebih diperhatikan dibandingkan dengan yang bermukim di sebelah timur, padahal status kepemilikan tanah keduanya adalah ilegal. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah memaparkan perbedaan perlakuan terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah barat dan timur di wilayah Bratang Gede yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Kata kunci: *Perkotaan, diskriminasi, distribusi otoritas*

Abstract

Urban has always offered an attraction, especially for the villagers who tried to change his luck with finding a job. For the people of the village, major cities such as Surabaya, just always has a strong appeal with a range of facilities that have been provided for example employment, educational institutions and other facilities that are not found in the village. This of course will encourage the urbanization rate of the village to the city are becoming increasingly high. The research was filmed at home along the river Jagir Wonokromo. Reasons for choosing this location was because of the kind of conflict that is latent in the people who live along the river the Jagir. the conflict was caused due to the discrimination between people who live in the West and who lives next door to the East. They assume that the people who live in the West are more recognized his rights as well as more attention compared to the living living in the East, whereas the status of land ownership are both illegal. The nature of research is descriptive qualitative approach using qualitative. As for the results of this research are exposing differences in the treatment of people living in East and West come within the relic Bratang Gede undertaken by the Government of the city of Surabaya.

Key word: *Urban, discrimination ,authority distribution,*

PENDAHULUAN

Perkotaan selalu menawarkan daya tarik, terutama bagi masyarakat desa yang ingin mengubah nasibnya melalui pekerjaan. Bagi masyarakat desa kota besar seperti Surabaya memiliki daya tarik yang kuat dengan berbagai fasilitas yang tersedia, misalnya tersedianya lapangan pekerjaan, lembaga pendidikan, sarana transportasi yang memadai serta fasilitas umum lainnya. Kondisi ini

menjadi daya tarik bagi masyarakat desa untuk melakukan migrasi dengan alasan untuk memperbaiki tarap hidup.

Tingginya angka urbanisasi di Surabaya. Urbanisasi di Surabaya telah menjadi penyakit tahunan, terutama pasca Lebaran. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, Kartika Indrayana menjelaskan idealnya jumlah penduduk di kota ini 75

orang per hektar. Namun pada kenyataannya, jumlah penduduk Surabaya sudah mencapai 87 orang per hektar. Kartika Indrayana juga menjelaskan kalau penduduk Surabaya telah mencapai sekitar 2,9 juta jiwa dengan luas kota sekitar 29.000 ha.

Jumlah penduduk di Surabaya sudah kelebihan atau *over capacity*. Menurut Kartika Indrayana jumlah penduduk Surabaya idealnya hanya 2,1 juta jiwa. Sehingga jika jumlah penduduk dikurangi jumlah ideal, Surabaya ditahun 2010 kelebihan 800 ribu jiwa. Bisa kita bayangkan, Surabaya akan kelebihan populasi dalam jumlah penduduk. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan lahan pemukiman di Surabaya. (Elin, 2010 :1(online)<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/178010surabaya--obesitas--800-ribu-jiwa>. diakses pada tanggal 30 april 2014).

Membeludaknya jumlah penduduk di Kota Surabaya secara langsung maupun tidak membentuk suatu fenomena berdirinya pemukiman kumuh atau pemukiman di Bantaran Sungai Jagir Wonokromo. Kedatangan mereka ke Surabaya membawa sebuah harapan untuk memperbaiki nasib menjadi lebih baik. Namun karena keterbatasan modal dan keahlian yang dimiliki, akhirnya mereka harus termarginalkan dari masyarakat kota dan dianggap sebagai perusak pemandangan kota. Hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan, yakni bertambahnya jumlah kemiskinan dan ancaman penggusuran dari Pemerintah Kota Surabaya.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Totok Wahyu Abadi dan Ita Kusuma Mahendrawati (2009) dengan judul Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan (Studi Kasus di Stren Kali Jagir Wonokromo-Surabaya). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang istilah penggusuran bagi masyarakat yang termarginalkan di perkotaan memiliki efek yang sangat mengerikan dari pada bencana. Sebagai subjek pembangunan semestinya mereka tidak menjadi korban. Terkadang jalannya penertiban terkesan lambat. Sehingga berujung pada tindakan paksa penggusuran. Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat yang tinggal di Stren Kali Jagir.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sulit tercapai karena tidak adanya koordinasi yang jelas dari berbagai instansi pemerintah, pejabat yang memiliki kekuasaan sehingga timbul persepsi mengenai kewenangan untuk mengatasi persoalan Stren Kali Jagir. Selanjutnya, tidak adanya kesamaan makna bagi pemerintah dan renovasi bagi warga setempat hingga akhirnya warga yang menjadi korban sebagai bentuk partisipasi keterpaksaan dalam pembangunan. Selain itu tidak adanya koordinasi dari institusi terkait untuk melakukan komunikasi yang bersifat partisipatoris kepada warga, sehingga pemerintah banyak

menggunakan komunikasi persuasif yang represif.(Abadi dan Mahendrawati. 2009: 112-128). (online) (<http://scriptura.petra.ac.id/index.php/iko/article/view/18315/18163>. Diakses tanggal 26 mei 2015).

Selanjutnya ada penelitian yang masih terkait masalah penggusuran ditinjau dari segi hukum dan humanisme. Penelitian yang disampaikan dalam bentuk makalah yang dilakukan oleh Setiawan (2010) dengan judul Penggusuran Pemukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Segi Hukum dan Humanisme. Dalam penelitian ini membahas bahwa pemukiman liar adalah hunian yang dibangun di lahan yang ditempati secara ilegal. Fenomena pemukiman ini berkembang seiring dengan tingkat urbanisasi. Salah satu bentuk pemukiman liar yang banyak ditemukan di Surabaya adalah yang terdapat di bantaran sungai.

Dalam perda Provinsi Jawa Timur no 9 Tahun 2007 tentang penataan sempadan di sungai Surabaya dan Wonokromo disebutkan mengenai batas sempadan dan pemanfaatan tanah pada sempadan sungai. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilakukan melalui sanksi administrasi dan upaya paksa. Upaya paksa inilah yang kemudian identik dengan istilah penggusuran. Namun keabsahan Perda ini masih menjadi perdebatan sehubungan dengan adanya surat klarifikasi dari Mendagri terkait dengan masalah substansi. Makalah ini berupaya untuk mengulas masalah penggusuran terhadap pemukiman liar di Stren Kali Jagir beberapa waktu yang lalu, serta pandangan terhadap penanganan terhadap penggusuran tersebut. keimpulan dari makalah ini adalah penanganan terhadap penggusuran dengan cara yang partisipatif. Sehingga bisa meminimalkan terjadinya konflik. (Setiawan. 2010. (online). (http://www.researchgate.net/profile/Rulli_Setiawan/publication/271514647_Penggusuran_Permukiman_Liar_di_Stren_Kali_Jagir_Sebuah_Tinjauan_dari_Sisi_Hukum_dan_Humanisme/links/54ca4e5c0cf2c70ce521c071.pdf diakses tanggal 26 mei 2015)

Jika dilihat dari kronologis mengenai masyarakat yang tinggal di Bantaran Sungai Jagir, pada awalnya hanya beberapa orang saja yang menempati lahan kosong di Bantaran Sungai Jagir. Bagi yang pertama kali datang ada sebutan khusus yakni *babat tanah*. Selain itu Bantaran Sungai Jagir masih satu wilayah dan belum dipecah menjadi dua. Hingga akhirnya oleh Pemerintah Kota Surabaya wilayah Bantaran Sungai Jagir dipecah menjadi dua, yakni wilayah barat dan timur. Adapun wilayah barat mayoritas dihuni oleh pendatang dari luar Kota Surabaya, seperti Madiun, Kediri, Ponorogo, Mojokerto dan Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan wilayah timur mayoritas dihuni oleh pendatang dari Madura dan wilayah Kota Surabaya sendiri, seperti Gubeng, Kenjeran dan Keputih. Kedua masyarakat yang

tinggal di Bantaran Sungai Jagir merasa memiliki hak menempati, karena mereka sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Apalagi bagi mereka yang pertama kali membuka lahan yang ada di Bantaran Sungai Jagir untuk dijadikan pemukiman. Sehingga ada semacam perebutan dominasi dan perasaan memiliki tanah hingga akhirnya menimbulkan penguasaan lahan. Seiring berjalannya waktu terjadi tindakan pendiskriminasian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat yang tinggal di wilayah timur. Hal ini tentu saja mengakibatkan kecemburuan sosial.

Tindakan pendiskriminasian yang terjadi pada masyarakat timur juga tidak bisa terlepas peran Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melakukan perbedaan perlakuan bagi masyarakat yang patuh dan tidak patuh terhadap himbauan untuk menjaga kebersihan Sungai Jagir. Masyarakat yang bermukim di wilayah barat sangat mematuhi himbauan dari Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di wilayah timur cenderung mengabaikan himbauan tersebut. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya memberikan semacam kompensasi berupa fasilitas PDAM, telepon, listrik serta surat tanah atau IMB. Selain itu status kepemimpinan RT wilayah barat diakui oleh pihak pemerintah dan Kelurahan Ngagel Rejo.

Masyarakat yang bermukim di wilayah timur beranggapan bahwa masyarakat yang bermukim di sebelah barat lebih diakui hak-haknya. Padahal status kepemilikan tanah keduanya adalah ilegal. Hal ini sangat menarik untuk diteliti dan diungkap mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pendiskriminasian ini sehingga menyebabkan konflik. Adapun konflik yang ada dalam masyarakat adalah kecemburuan sosial antara masyarakat timur terhadap barat.

Konflik ini bisa saja terakumulasi, sehingga ada kemungkinan menjadi konflik terbuka. Penelitian ini memfokuskan kajiannya kepada tindakan pendiskriminasian masyarakat yang bermukim di Bratang Gede sebelah barat dan timur di Bantaran Sungai Jagir Wonokromo.

METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif deskriptif biasa juga penelitian taksonomi dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2007:20). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih mendalam dan kemudian menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau naratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan digunakan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai

fenomena dan informasi dari subjek serta diteliti melalui pendekatan-pendekatan data dan teori dan kemudian diolah secara induktif.

Penelitian ini mengambil lokasi pemukiman di sepanjang Sungai Jagir Wonokromo, yakni di Bratang Gede. Alasan memilih lokasi ini adalah karena ada semacam konflik laten dalam masyarakat yang bermukim sepanjang Sungai Jagir tersebut.

Konflik ini disebabkan adanya pendiskriminasian antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Masyarakat yang bermukim disebelah timur beranggapan bahwa masyarakat yang bermukim di sebelah barat lebih diakui hak-haknya serta lebih diperhatikan dibandingkan dengan yang bermukim di wilayah timur. Padahal, status kepemilikan tanah keduanya adalah ilegal. Sedangkan untuk waktu penelitiannya sendiri dilakukan pada bulan April 2014.

Ketika melakukan pengambilan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah metode penentuan subjek penelitian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu aktor-aktor yang diambil memiliki peran besar dalam masyarakat dan mengerti permasalahan penelitian. Selain itu, pemilihan teknik *purposive* bertujuan mempermudah peneliti dalam melakukan proses penggalan data awal. Aktor yang berpengaruh di masyarakat tersebut yaitu Ketua RT baik yang berada di sebelah barat maupun timur.

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan terlebih tentang lokasi maupun masyarakat yang menempati lokasi di sebelah barat dan timur di Bantaran Sungai Jagir Wonokromo. Peneliti memilih teknik pengamatan karena ingin mencari informasi lebih mendalam tentang permasalahan diskriminasi, sehingga ditentukan *key informant* yang memiliki kemampuan serta informasi terkait dengan topik penelitian. Setelah mendapatkan *key informan*, peneliti diarahkan pada informan-informan pendukung untuk memenuhi data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun *key informan* adalah Ketua RT, baik yang bermukim di wilayah barat maupun timur.

Wawancara dengan informan diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelumnya mulai dari proses *getting in* sebagai bentuk pendekatan seperti peneliti ikut beradaptasi dan bersosialisasi dengan informan atau masyarakat terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang bermukim di wilayah barat dan timur. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) agar diperoleh data yang mendalam. Selain itu juga, peneliti menjalin *trust* (kepercayaan) dengan informan. Sehingga peneliti bisa diterima di lingkungan tempat tinggal informan.

Sedangkan untuk mendukung data-data yang terdapat dilapangan peneliti juga mengumpulkan data sekunder yaitu dalam bentuk foto maupun data-data lain yang ditemukan ketika proses pengumpulan data sehingga dapat menambah kelengkapan dari data. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif berfokus pada deskripsi dan penunjukan makna serta penempatan data pada konteksnya masing-masing dengan melukiskannya di dalam kata-kata. Maka perlu disusun pola, kategori, fokus, tema tertentu, atau pokok masalah tertentu. Sehingga setiap catatan pengumpulan data hasil wawancara perlu direduksi sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil pemahaman dan pengertiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Diskriminasi

Pada awalnya masyarakat yang bermukim di Bantaran Sungai Jagir, baik wilayah sebelah barat dan timur sama-sama berstatus ilegal. Mereka hanya menempati tanah kosong yang ada di Bantaran Sungai Jagir dengan mendirikan rumah semi permanen. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut bertambah banyak karena tingginya kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal.

Bedasarkan penuturan WT, Ketua RT wilayah barat Barang Gede mengaku satu kepemimpinan di wilayah barat diakui oleh Kelurahan Ngagel Rejo. WT menjelaskan bahwa masyarakat pada awalnya datang ke wilayah ini secara berbondong-bondong. Semula wilayah di Bantaran Sungai Jagir adalah lahan kosong dan hanya ditumbuhi ilalang. Mayoritas dari mereka berasal dari luar Surabaya.

WT tinggal di wilayah barat selama 10 tahun. WT berasal dari Semarang-Jawa Tengah. WT juga menjelaskan pada awalnya dahulu tanah yang sekarang dijadikan sebagai pemukiman penduduk tersebut merupakan tanah dengan status kepemilikan dari PDAM. Wilayah ini terbagi menjadi dua, yakni wilayah barat dan timur. Masyarakat yang menempati tanah kepemilikan dari PDAM tersebut tidak memiliki izin. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menempati wilayah tersebut dengan statusnya yang ilegal. Kemudian ada perbedaan sikap dari masyarakat yang tinggal di wilayah barat dan timur. Masyarakat yang bermukim di wilayah barat, lebih mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah dan mau mengurus segala kepentingan yang menyangkut administrasi sebelum menempati lingkungan tersebut.

Setelah mendapatkan kesepakatan dengan pihak PDAM, kemudian dari pihak Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan PERDA (Peraturan Daerah) no. 9 tahun

2007 yang menyatakan kepada masyarakat untuk menjadi penjaga Sungai Jagir "*Jogo Kali*" yang dilakukan dengan tidak membuang kotoran-kotoran terutama kotoran manusia ke sungai sehingga bisa mencemari lingkungan atau kali sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah barat sudah memiliki septiteng untuk pembuangan kotorannya. Selain itu juga panjang setiap rumah yang berada di pinggir Sungai Jagir tersebut hanya sekitar 7 meter dan jarak antara rumah dengan sungai harus lebih dari 5 meter.

WT yang merupakan lulusan SMA, menjelaskan dengan adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat sadar untuk menata rumah-rumah yang mereka tempati dengan melakukan beberapa perubahan yang dahulunya rumah-rumah yang terdapat di wilayah barat banyak yang membelakangi sungai sehingga dapur dari rumah itu terdapat dekat dengan bibir Sungai Jagir tetapi lama kelamaan banyak warga masyarakat yang merubah arah rumahnya sehingga sekarang rumah yang terdapat di wilayah barat hampir semuanya menghadap ke bantaran sungai hal ini dilakukan untuk lebih nyaman dan untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh pemilik tanah (PDAM) untuk bisa tetap tinggal di wilayah barat tersebut.

Setelah mematuhi syarat yang diberikan oleh dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menjaga lingkungan sungai membuat wilayah barat mendapatkan pengakuan dari pemerintah yang dibuktikan dengan bahwa di wilayah barat memiliki susunan kepengurusan RT dan RW sampai jenjang yang paling tinggi. Setelah memiliki kepengurusan RT dan RW yang jelas maka secara langsung masyarakat yang bermukim di wilayah barat sudah memiliki KTP, surat tanah atau IMB, dan surat-surat yang memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat yang bermukim di wilayah.

WT menjelaskan masyarakat di wilayah barat mendapatkan fasilitas listrik, PDAM, telfon dan status kepemilikan lahan diakui karena mempunyai surat tanah atau IMB. Hal ini karena wilayah barat memiliki kepengurusan RT yang jelas. Selain itu juga ada pengakuan kepengurusan RT dari pihak Kelurahan Ngagel Rejo. Sehingga ada jaminan dari Pemerintah Kota Surabaya sendiri untuk memberikan perlindungan. Kalau pun pemerintah melakukan penggusuran kepada rumah yang mereka tinggali, tentu saja ada semacam ganti rugi yang layak dari pemerintah.

Berbeda dengan penuturan EK, Ketua RT wilayah timur Bratang Gede mengaku satu kepemimpinan di wilayah timur tidak diakui oleh Kelurahan Ngagel Rejo. EK sendiri menempati wilayah timur selama 10 tahun. EK berasal dari Keputih-Surabaya. EK menjelaskan bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah timur cenderung mendapat perlakuan yang berbeda.

Diantaranya, tidak diakuiinya status kependudukan dan tidak mendapatkan fasilitas PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Padahal ketika menempati wilayah tersebut status kependudukan sama-sama ilegal.

EK yang merupakan lulusan SD, juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima masyarakat yang bermukim di wilayah timur antara lain, kendala administrasi ini dalam mengurus KTP atau Surat Nikah. Sehingga masyarakat yang bermukim di wilayah timur enggan mengurus KTP atau Surat Nikah di Kelurahan Ngagel Rejo. Selain itu jika ada warga yang meninggal, mereka bingung mau di makamkan dimana. Hal ini dikarenakan wilayah Bratang Gede tidak mempunyai tempat pemakaman umum. EK menjelaskan kalau ada warga yang meninggal biasanya dimakamkan di wilayah Keputih, Surabaya. Jarak antara Bratang Gede dengan Keputih sangat jauh sehingga memerlukan biaya yang besar untuk melakukan pemakaman.

Untuk mensejahterakan biaya pemakaman tersebut EK selaku ketua RT, meminta iuran pada warga untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Selain itu masalah yang dihadapi masyarakat wilayah adalah penggusuran. Menurut EK, maraknya isu penggusuran yang diwacanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya membuat masyarakat yang bermukim di wilayah timur menjadi khawatir. Apalagi jika sewaktu-waktu diadakan penggusuran.

EK juga menjelaskan mengenai perubahan status kepemilikan tanah, dimana wilayah barat yang pada awalnya tidak diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi diakui secara resmi. Sedangkan masyarakat wilayah timur tetap tidak ada perubahan dalam hal kepemilikan terhadap tanah yang ditempati. Setelah ditelisik lebih lanjut, ditemukan alasan yang menyebabkan wilayah barat mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kota Surabaya. Masyarakat wilayah timur tidak begitu patuh terhadap himbauan pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga membuat Pemerintah Kota Surabaya memberikan perbedaan perlakuan berupa diskriminasi.

EK juga sempat melayangkan sikap protes kepada Pemerintah Kota Surabaya terhadap tindakan pendiskriminasi masyarakat yang tinggal di wilayah timur. EK merasa bahwa Pemerintah Kota juga ikut bertanggung jawab terhadap tindakan pendiskriminasi. Namun karena tidak mempunyai akses untuk menyampaikan protesnya tersebut, EK hanya bisa pasrah dengan keadaan. EK juga ragu kalau protes nanti akan berakibat buruk bagi kehidupannya kelak. EK takut kalau sampai masuk penjara. Apalagi EK hanya bekerja sebagai pemulung yang harus istri dan kedua anaknya.

EK juga merasa enggan jika berkonflik dengan Pemerintah Kota Surabaya. Walaupun EK menyadari kalau Pemkot adalah penyebab dari masalah pendiskriminasi masyarakat wilayah timur. Hal ini karena EK tidak mempunyai dukungan, terutama dari

pihak-pihak terkait misalnya LSM. Sebenarnya EK sangat berharap ada lembaga atau pihak-pihak yang peduli untuk memperjuangkan nasib warga yang bermukim di wilayah timur agar status kependudukannya diakui serta mendapatkan fasilitas yang sama seperti masyarakat yang bermukim di wilayah barat.

Dilihat dari pemaparan EK, menunjukkan tindakan pendiskriminasi yang cukup jelas antara masyarakat yang bermukim di Bantaran Sungai Jagir yang berada di wilayah barat dan timur. Namun jika dilihat dari latar belakang keduanya, baik masyarakat yang bermukim di wilayah barat dan timur sama-sama tidak memiliki hak dan surat ijin yang jelas untuk tinggal di sepanjang Sungai Jagir. Namun masyarakat wilayah barat sangat patuh kepada Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan wilayah timur cenderung kurang begitu patuh. Hal inilah yang menjadikan perbedaan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya hingga menimbulkan adanya diskriminasi.

Adapun hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa sebab perbedaan perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Pertama* masyarakat yang bermukim di wilayah barat mematuhi anjuran dari pemerintah untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan Sungai Jagir. *Kedua* masyarakat wilayah barat yang gampang diatur dan lebih tertib. Hal ini bisa dibuktikan dengan kondisi lingkungan dan tempat tinggal yang bersih dan teratur.

Selain hasil dari pengamatan dari bentuk tempat tinggal dan kepatuhan. Masyarakat wilayah barat mayoritas dihuni oleh masyarakat dari kelas menengah keatas. Adapun pekerjaan dari masyarakat wilayah barat antara lain pedagang, buruh pabrik wiraswasta, guru, dan sebagainya. Menurut penuturan WT, ketua RT wilayah barat, masyarakat yang tinggal di wilayah barat memang berkecukupan. Seperti halnya WT yang merupakan pensiunan dari Angkatan Laut yang setiap bulannya menerima tunjangan pensiun. Dengan tunjangan tersebut, WT mampu membiayai pendidikan anak-anaknya sampai ke Perguruan Tinggi. WT juga menjelaskan kalau rata-rata pendidikan masyarakat yang tinggal di wilayah barat adalah lulusan SMA.

Sedangkan masyarakat yang bermukim di wilayah timur cenderung sukar untuk diatur. Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat yang bermukim di wilayah timur cenderung kurang tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Hal kemudian yang menjadi pembeda antara wilayah timur dengan wilayah barat adalah kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. EK, Ketua RT wilayah timur menjelaskan kalau masyarakat wilayah timur bekerja sebagai pemulung, pengamen, kuli bangunan dan sebagainya. Sedangkan rata-rata pendidikan masyarakat wilayah timur hanya sampai jenjang SD. Bahkan ada juga yang terpaksa putus sekolah dengan alasan membantu pekerjaan orang tua.

Kondisi perekonomian masyarakat wilayah timur berada dibawah rata-rata. EK sendiri juga mengakui kalau sulit untuk mengatur warganya. Hal ini karena

warganya terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan masing-masing. Misalnya, ketika ada acara kerja bakti yang dilakukan pada hari minggu, banyak warga yang tidak datang dengan alasan sibuk. EK pun memaklumi sikap dari warganya tersebut. Sebagai ganti dari ketidakhadiran warganya tersebut, EK meminta sumbangan seikhklasnya yang nantinya digunakan sebagai uang kas untuk konsumsi warga yang ikut kerja bakti.

Distribusi Otoritas antara Wilayah Barat dan Timur

Adanya perbedaan perlakuan yang diberikan antara wilayah barat dan wilayah timur merupakan bukti dari pembagian atau distribusi kekuasaan yang tidak merata. Dahrendorf mengatakan bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan, karena yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo* (Wirawan, 2013:88). Adapun *status quo* yang dipertahankan adalah pengakuan serta perlakuan istimewa dari Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat yang bermukim di wilayah barat. Sesuai dengan konsep dari Dahrendorf mengenai distribusi otoritas. Distribusi otoritas tersebar secara tidak merata dan tidak jarang menimbulkan konflik.

Salah satu penyebab konflik dalam masyarakat adalah penyebaran distribusi otoritas atau kekuasaan yang berbeda-beda serta tidak merata (Raho, 2004: 78). Menurut Dahrendorf, berbagai posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat berkuasa atau mempunyai otoritas yang tinggi dan ada orang lain yang mempunyai sedikit kekuasaan atau otoritas. Kekuasaan dan otoritas tidak bersifat tetap karena ia melekat pada posisi bukan pribadi (Raho, 2004:79)

Pembagian otoritas kekuasaan yang tidak merata ini bisa memicu konflik. Adapun distribusi otoritas yang diterima adalah legitimasi dari Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat yang bermukim di wilayah barat. Sehingga mereka bisa menikmati berbagai fasilitas dari Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, listrik, telepon dan saluran air dari PDAM. Adanya kemudahan dalam mengurus administrasi dan jaminan ganti rugi jika sewaktu-waktu digusur oleh Pemerintah Surabaya. Sedangkan masyarakat di wilayah timur tidak mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Kota Surabaya sehingga status pendudukannya menjadi ilegal.

WT menjelaskan kalau wilayah barat mendapatkan perlakuan istimewa dari Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini karena kepatuhan masyarakat yang bermukim di wilayah barat terhadap intruksi pemerintah untuk menjaga kebersihan sungai. Masyarakat dihimbau tidak membuang sampah secara sembarangan. Masyarakat juga memundurkan bangunan rumahnya dari bibir sungai dengan jarak 3-5 meter. Kemudian bekas bangunan

rumah yang dimundurkan tersebut dijadikan jalan setapak yang membentang dari arah barat sampai ke timur.

Sebagai ungkapan terimakasih kepada perlakuan yang telah diberikan, masyarakat yang bermukim di wilayah barat rutin mengadakan kerja bakti yang diadakan seminggu sekali. Sehingga kondisi lingkungan menjadi bersih. Jika dilihat dari kondisi kebersihan lingkungan, wilayah barat cenderung tertata rapi dengan kondisi jalan yang baik. Selain itu didepan rumah masyarakat terdapat beraneka macam tanaman mulai dari bunga, pohon pisang serta pohon-pohon lainnya.

Menurut penuturan PR, informan yang bermukim di sebelah barat menjelaskan tujuan dari penghijauan adalah mencegah pengikisan Bantaran Sungai Jagir agar tidak terjadi banjir. PR tinggal di wilayah barat selama 9 tahun. PR berasal dari Mojokerto-Jawa Timur. PR juga menjelaskan kondisi lingkungan yang ada di wilayah barat yang bersih dan tertata dengan baik. PR yang merupakan lulusan SMA juga menjelaskan bahwa masyarakat sudah mematuhi peraturan pemerintah bahwa masyarakat yang bermukim di Bantaran Sungai Jagir harus memberi jarak bangunan rumah dengan sungai sekita 3-5 meter. Secara otomatis, warga yang awalnya membangun rumah dekat dengan bantaran sungai memundurkan bangunan secara bersama-sama. Kemudian bekas dari bangunan rumah warga yang dimundurkan tersebut dibuat jalan setapak membentang dari arah barat sampai ke timur.

Berbeda dengan wilayah bagian timur yang cenderung kumuh dan keadaan tempat tinggal masyarakat kurang tertata dengan baik. Masyarakat yang bermukim di sebelah timur kurang bisa untuk diatur. Mayoritas yang tinggal wilayah timur dihuni oleh pemulung, pekerja serabutan dan pengamen jalanan. Menurut WT, hal ini membuat masyarakat yang bermukim di wilayah barat enggan untuk berkomunikasi serta interaksi kepada masyarakat di wilayah timur.

Menurut penuturan SN, informan yang bermukim di wilayah timur menjelaskan bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah barat memang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu status kepengurusan RT. SN sendiri sudah tinggal di wilayah timur selama 8 tahun. SN berasal dari Gubeng-Surabaya. Selama tinggal di wilayah timur SN merasa sangat kesulitan karena SN tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti RASKIN dan BLT. SN bersama warga pernah menanyakan hal tersebut kepada EK, Ketua RT wilayah timur. Namun EK menjelaskan kalau SN bersama warga lainnya tidak mendapatkan bantuan tersebut karena tidak memiliki KTP. Mendengar penjelasan tersebut SN bersama warga lainnya hanya bisa kecewa. SN sendiri tidak pernah mengenyam bangku pendidikan karena sejak kecil sudah bekerja membantu

orang tuanya berjualan di pasar. Sekarang SN hanya bekerja sebagai buruh pengumpul kodok di Pasar Pecindilan-Surabaya. Penghasilannya yang tidak menentu membuat kondisi perekonomian keluarganya sangat pas-pasan.

SN juga menjelaskan kalau masyarakat yang bermukim di wilayah timur juga menginginkan fasilitas ponton atau pemandian umum. Tetapi masyarakat dan Ketua RT wilayah barat tidak setuju dan menolak dengan alasan akan disalahgunakan. Adanya kecurigaan serta kekhawatiran bahwa ponton tersebut akan dimanfaatkan airnya untuk dijual. Kecurigaan masyarakat barat bahwa pembuatan ponton dan saluran PDAM tersebut akan disalahgunakan. Seperti kasus yang terjadi ketika masyarakat yang bermukim di wilayah timur membeli air PDAM dari masyarakat di wilayah barat.

SN menjelaskan ada sebagian oknum dari masyarakat wilayah timur membeli air tersebut seharga Rp1000. Tetapi air tersebut kemudian tersebut dijual kembali kepada masyarakat yang bermukim di wilayah lain dengan harga Rp 2000. Hal inilah yang membuat jengkel masyarakat wilayah barat, karena merasa dimanfaatkan oleh sebagian oknum dari masyarakat timur yang tidak bertanggung jawab.

Dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang bertentangan, yaitu penguasa dan yang dikuasai (Wirawan, 2013:88). Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Bratang Gede yang bermukim di Bantaran Bantaran Sungai Jagir. Pertentangan ini terjadi karena golongan yang berkuasa yakni masyarakat yang bermukim di wilayah barat cenderung mempertahankan *status quo*, sedangkan masyarakat yang bermukim di wilayah timur berusaha mengadakan perubahan-perubahan. Adapun perubahan yang dilakukan adalah upaya penuntutan memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dahrendorf melihat yang terlibat konflik adalah kelompok semu (*quasi group*) yaitu para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan sama dan terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Adapun kelompok kedua adalah kelompok kepentingan yang terdiri dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat (Wirawan, 2013, 88-89).

Potensi konflik bisa muncul dalam masyarakat yang bermukim di wilayah barat (kelompok semu/ *quasi group*) mempunyai kecenderungan mempertahankan *status quo*. Hal ini karena masyarakat yang bermukim di sebelah mendapatkan legitimasi dari Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan masyarakat di sebelah timur merasa

dikuasai dan akan menuntut hak-haknya agar diakui. Kelompok kepentingan ini bisa mengarahkan konflik yang semula hanya tertutup menjadi konflik yang konflik terbuka.

Berbicara masalah konflik yang terjadi dalam masyarakat Bantaran Sungai Jagir tidak terlepas dari pertentangan dari kedua kelompok dengan kepentingan berbeda. Dalam perspektif konflik menurut Marx, konflik adalah pertentangan antara kelas borjuis dan kelas proletar dalam memperebutkan sumber daya (Ritzer, 2012:65). Adapun sumber daya yang diperebutkan, baik masyarakat barat maupun timur adalah fasilitas dan legitimasi kependudukan. Dalam hal ini masyarakat yang tinggal di wilayah barat sudah mendapatkannya. Sedangkan wilayah timur sedang berusaha untuk mendapatkannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dahrendorf menawarkan solusi berupa redistribusi kekuasaan agar penyebaran kekuasaan tersebut menjadi merata. Sama halnya dengan distribusi kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah barat berupa legitimasi terhadap status kependudukan serta pemberian berbagai fasilitas seperti PDAM, Listrik dan telepon. Masyarakat yang bermukim di wilayah timur hendaknya juga diberikan fasilitas yang sama agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Meskipun stigma yang berkembang dalam masyarakat bahwa yang tinggal di wilayah timur itu susah untuk diatur dan cenderung resisten. Namun ketika oleh Pemerintah Kota Surabaya diberi pengakuan terhadap status kependudukan, serta pemberian fasilitas yang sama bukan tidak mungkin masyarakat yang bermukim di wilayah timur akan menjadi patuh juga.

PENUTUP

Simpulan

Memang ada bentuk perlakuan berbeda bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Bratang Gede. Bisa dikatakan telah terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah Bratang Gede, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah timur. Padahal pada awalnya status masyarakat barat dan timur ketika datang ke wilayah tersebut sama-sama ilegal. Bentuk diskriminasi yang diterima masyarakat wilayah timur tidak diakui kepemimpinan RT. Sedangkan masyarakat wilayah barat mempunyai RT dan RW yang jelas. Selain itu status kepemimpinan RT wilayah barat juga diakui oleh pihak Kelurahan Ngagel Rejo. Selain itu status kepemilikan tanah masyarakat yang bermukim di wilayah barat diakui karena mempunyai sertifikat tanah atau IMB, serta memiliki KTP. Selain itu berbagai fasilitas seperti listrik, PDAM,

telepon juga dinikmati masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut karena memiliki kepengurusan wilayah yang jelas dan pengakuan dari pemerintah.

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang bermukim di wilayah timur yang tidak memiliki struktur kepengurusan RT yang jelas. Untuk Ketua RT sendiri dipilih berdasarkan kesepakatan masyarakat yang bermukim di wilayah timur tanpa adanya surat keputusan yang resmi dari pihak Kelurahan Ngagel Rejo. Selain itu fasilitas listrik, PDAM tidak bisa dinikmati oleh masyarakat yang bermukim di wilayah timur karena tidak mempunyai KTP asli Surabaya dan sertifikat tanah atau IMB. Selain itu ancaman penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selalu membayangkan masyarakat karena memang tidak memiliki tempat tinggal lagi selain di wilayah tersebut.

Saran

Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang memiliki otoritas kekuasaan tertinggi hendaknya dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah barat maupun di wilayah timur. Sehingga antar masyarakat tidak ada kecemburuan sosial dan tindakan yang mengarah pada diskriminasi mengenai status pengakuan sebagai warga negara yang sah dimata hukum dan negara. Selain itu juga masyarakat yang tinggal di wilayah timur hendaknya mematuhi segala peraturan yang telah dibuat mengingat status kependudukan mereka yang ilegal. Sehingga bentuk pendiskriminasian yang mereka terima dari Pemerintah Kota Surabaya diganti dengan bentuk perhatian. Seperti halnya bentuk perhatian Pemerintah Kota Surabaya terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Wahyu Totok dan Mahendrawati, Ita Kusuma. 2009. *Penertiban Versus Penggusuran: Strategi Komunikasi dan Partisipasi Pembangunan (Studi Kasus di Stren Kali Jagir Wonokromo-Surabaya)*. (online).(<http://scriptura.petra.ac.id/index.php/iko/article/view/18315/18163>. diakses tanggal 26 mei 2015)
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Poloma, M. Margaret. 2013. *Sosiologi Kontenporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Presada.
- Setiawan, Ruli Pratiwi. 2010. *Penggusuran Pemukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme* (online). (http://www.researchgate.net/profile/Rulli_Setiawan/publication/271514647_Penggusuran_Permukiman_Liar_di_Stren_Kali_Jagir_Sebuah_Tinjauan_dari_Sisi_Hukum_dan_Humanisme/links/54ca4e5c0cf2c70ce521c071.pdf diakses tanggal 26 mei 2015)
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Ritzer, George,& Goodman, Doglas J. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- Wirawan IB. 2013 *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial)* . Jakarta: kencana prenatal media grup.
- Yunita, Kristianti Elin. 2010. *Surabaya Kelebihan Penduduk 800 Orang*. (online). (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/178010-surabaya--obesitas--800-ribu-jiwa>. diakses pada tanggal 30 april 2014)